



**KAJIAN KEBIJAKAN KURIKULUM
PENDIDIKAN KHUSUS
(2008)**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PUSAT KURIKULUM TAHUN 2008**

A. Latar Belakang

Hasil kajian pada langkah sebelumnya perlu dianalisis lebih jauh dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan operasional. Analisis ini memnitikberatkan pada keterlaksanaan kebijakan, konsep dan sistem penyelenggaraan pendidikan khusus. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk mencari berbagai alternatif penyelenggaraan pendidikan khusus, khususnya C, C1, D1 dan inklusi/Terpadu).

B. Tujuan

Langkah ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap hasil kajian sebelumnya untuk menemukan berbagai solusi sesuai dengan karakteristik peserta didik dan penyelenggaraan pendidikan khusus dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. SK dan KD SDLB-C
2. SK dan KD SDLB-C1
3. SK dan KD SDLB-D1
4. Pendidikan Inklusi/Terpadu

C. Hasil Yang Diharapkan

Hasil analisis terhadap kajian sebelumnya untuk menemukan berbagai solusi sesuai dengan karakteristik peserta didik dan penyelenggaraan pendidikan khusus, yaitu mencakup:

1. SK dan KD SDLB-C
2. SK dan KD SDLB-C1
3. SK dan KD SDLB-D1
4. Pendidikan Inklusi/Terpadu

D. Strategi kegiatan

Secara umum sekgiatan ini dilakukan melalui workshop dan diskusi fokus, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Pada hari pertama, setelah pembukaan, semua peserta dibagi kelompok sesuai dengan jenis dan aspek kajian. Setiap kelompok membahas kebijakan, teori, dan data empiris berkaitan dengan penerapan kebijakan pendidikan khusus. Hari ke-2 dan ke-3, diskusi fokus di masing-masing kelompok untuk menemukan berbagai informasi hasil analisis terhadap hasil kajian kebijakan, implementasi dan konsep penyelenggaraan PKH sesuai dengan karakter peserta didik, dan penyelenggaraanya.. Hari ke-4 dan 5 sidang pleno menyimpulkan hasil kajian masing-masing kelompok.

E. Jadwal (Waktu dan Tempat)

Kegiatan ini dilakukan sebanyak 2 kali, Pertama dilakukan di Yogyakarta pada tanggal 19 – 23 Februari 2008 membahas konsep dasar penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan inventarisasi berbagai persoalan sehubungan dengan diterbitkan SK dan KD untuk SDLB C, C1, dan D1, serta kajian panduan pelaksanaan pendidikan inklusi. Kedua, pembahasan dokumen dan konsep pendidikan khusus lanjutan dengan mengkaji semua dokumen-dokumen terkait dan merupakan kelanjutan dari hasil Yogyakarta. Sebagai bahan perbandingan, juga dilakukan pengkajian terhadap penyelenggaraan pendidikan khusus di negara lain. Kegiatan ini di lakukan pada tanggal 24-28 Maret 2008 di Cisarua- Bogor.

Seharusnya kegiatan ini dilanjutkan dengan langkah berikut yaitu analisis hasil kajian. Namun karena adanya krisis APBN yang berakibat pemotongan anggaran, kegiatan kajian kurikulum pendidikan khusus ini termasuk yang dipotong anggarannya sehingga kegiatan berikutnya adalah Kegiatan Penyusunan Laporan Akhir dalam rangka penyusunan rekomendasi hasil diskusi kajian yang dilakukan di Cisarua – Bogor tanggal 15 – 19 Desember 2008.

F. Daftar Peserta yang dilibatkan

Kegiatan ini melibatkan semua unsur terkait dengan penyelenggaraan pendidikan khusus dengan Pusat Kurikulum sebagai koordinator kegiatan.

G. Hasil Kegiatan

Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pengembangan kurikulum secara berdiversifikasi dimaksudkan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah.

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: pendidikan agama; pendidikan kewarganegaraan; bahasa; matematika; ilmu pengetahuan alam; ilmu pengetahuan sosial; seni dan budaya; pendidikan jasmani dan olahraga; keterampilan/kejuruan; dan muatan lokal.

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam bidang pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan.

Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, di antaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat; penyusunan standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara profesional; penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan; pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi; serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multimakna. Pembaharuan sistem pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum.

Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP.

Kurikulum tingkat satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik.

Sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah, mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK.

Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan khusus meliputi SDLB, SMPLB, dan SMALB atau bentuk lain yang sederajat.

Pusat Kurikulum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan bagi pengembangan standar isi dan standar proses, pengembangan kurikulum, serta sarana dan prasarana pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal, dan pendidikan khusus. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Kurikulum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan bagi pengembangan standar isi dan standar proses;
- b. pengembangan model dan inovasi kurikulum;
- c. pengembangan model sarana dan prasarana pembelajaran;
- d. pelayanan profesional pengembangan kurikulum, silabus, dan pembelajaran;
- e. pemantauan penerapan standar isi dan standar proses; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Pusat.

Rincian tugas Pusat Kurikulum secara umum adalah:

- a. melaksanakan kajian kebijakan kurikulum untuk bahan perumusan kebijakan pengembangan standar isi dan standar proses serta sarana dan prasarana
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan standar isi dan standar proses serta sarana dan prasarana
- c. melaksanakan penyusunan pedoman pelaksanaan pengembangan kurikulum
- d. melaksanakan pengembangan kurikulum dan sarana dan prasarana pembelajaran
- e. melaksanakan pengembangan model kurikulum dan pembelajaran
- f. melaksanakan pengembangan model sarana dan prasarana
- g. melaksanakan pemberian bimbingan teknis pengembangan kurikulum, silabus, dan pembelajaran
- h. melaksanakan pemantauan penerapan standar isi dan standar proses serta sarana dan prasarana
- i. melaksanakan pengembangan model layanan bimbingan dan konseling serta pengembangan model layanan pendidikan lainnya
- j. melaksanakan penyusunan bahan kerja sama pengembangan kurikulum dan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran
- k. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi jaringan pengembangan kurikulum dan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran
- l. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen

1. KAJIAN SK DAN KD SDLB TUNAGRAHITA RINGAN (C)

Kondisi anak C secara umum adalah sebagai berikut.

- Aspek genetik: IQ 50 – 70, Mampu untuk dididik, memiliki Emosi Labil, memiliki potensi akademik maksimal setara dengan siswa normal kelas 2
- Interaksosial; apabila bergabung dengan siswa normal, maka akan cenderung Dikucilkan, Dicemooh, dan Mengganggu siswa lain
- Tenaga pendidik: Masih kekurangan guru (banyak guru yang merangkap kelas dan mata pelajaran, kompetensi guru cukup memadai, pendekatan belajar individual belum maksimal sehingga kelas paling banyak 5 siswa per rombongan belajar
- Sarana dan prasarana: Meja kursi siswa belum sesuai dengan umur dan jenjang pendidikan

2. KAJIAN SK DAN KD TUNA GRAHITA SEDANG (C1)

Kondisi anak C1 secara umum adalah sebagai berikut.

- Kondisi genetik: IQ (40 – 50), Mampu dilatih, Emosi Labil, memiliki keterbatasan Memori terbatas, Sosialisasi kurang, gerak otoriknya kasar, cara berpikir lamban, memiliki kemampuan akademik setara maksimal dengan siswa normal kelas 1, biasanya disertai cacat penyerta
- Interaksi sosial apabila bercampur dengan anak normal: Anak dapat dipastikan terkucil di lingkungan sekolah, Ada cemoohan, Mengganggu siswa lain
- Pendidik: Kebanyakan guru bukan berasal dari bidang akademik tertentu, belum menguasai materi dengan baik, merangkap guru kelas lain, penguasaan pendekatan belajar belum cukup
- Sarana dan prasarana: Meja dan kursi siswa belum sesuai dengan umur dan jenjang, Ukuran papan tulis yang tidak cocok, kesulitan mencari Buku sumber yang sesuai, kurangnya Alat peraga

3. KAJIAN SK DAN KD TUNA DAKSA SEDANG (D1)

Kondisi anak D1 secara umum adalah sebagai berikut.

- Kondisi genetik: memiliki cacat fisik dan mental/hiperaktif, rendahnya intelegensi, potensi jauh dibanding anak normal, kemampuan akademik maksimal setara siswa normal kelas 3
- Interaksi sosial apabila bercampur dengan anak normal: kurang bersosial, mengganggu siswa lain, dikucilkan
- Pendidik: belum profesional, belum menguasai materi dengan baik, merangkap guru kelas lain, penguasaan pendekatan belajar belum cukup, belum optimal memberi layanan individual
- Sarana dan prasarana: yang umumnya tersedia di SLB OT, spejy Therapy, Hidro Therapy, Pysio Therapy

4. KAJIAN KEBIJAKAN KURIKULUM PENDIDIKAN INKLUSI/TERPADU

Pendidikan inklusif harus dipahami sebagai pendidikan bukan hanya untuk anak yang berkelainan, melainkan bagi semua anak tanpa membedakan status, jender, termasuk anak-anak yang "terkucilkan" ketidakberuntungan dalam segala faktor, baik secara internal maupun. Perlu ada kesepahaman tentang pendidikan inklusif ini bagi semua kalangan.

Resolusi internasional: pendidikan inklusif sebagai pendidikan terbuka, Indonesia sebagai salah satu negara anggota UNESCO harus menandatangani resolusi ini, jika tidak, akan ada sanksi. Sebagai salah satu contoh, belum lama ini pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia "ditegur" oleh UNESCO dengan konsep "Terpadu" yang memaksa peserta didik untuk menyesuaikan dengan sistem. Dalam berbagai forum internasional, selalu ditegaskan bahwa inklusif bukan hanya untuk anak cacat.

REKOMENDASI

1. KAJIAN KEBIJAKAN KURIKULUM SDLB TUNAGRAHITA RINGAN (C)

Perlu dikaji dan dikembangkan SK dan KS untuk anak C, namun tetap disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sebagai berikut.

- Kemampuan akademik maksimal setara kelas 2
- Dilengkapi dengan pendekatan pembelajaran sesuai kondisi siswa C
- Dilengkapi panduan penggunaan SK dan KD serta panduan pembelajaran yang jelas
- Dilengkapi panduan pengembangan sarana prasarana yang sesuai siswa C
- Karakteristik SK dan KD adalah praktis dan digunakan langsung dalam kehidupan sehari-hari siswa C

Perlu SK dan KD khusus agar terlatih koordinasi sensomotorik, dapat mengurus diri pribadi, memelihara dan memimpin diri, acuh tak acuh suka menarik diri.

Perlu dikembangkan prinsip pembelajaran untuk melatih mengendalikan diri, intensitas konsentrasi, perhatian pada orang, latihan motivasi.

Peningkatan kecedasan hanya tahap optimasi, perlu lebih menekankan keterampilan langsung terkait penggunaan kemampuan akademiknya

2. KAJIAN KEBIJAKAN KURIKULUM TUNA GRAHITA SEDANG (C1)

Perlu dikaji dan dikembangkan SK dan KS untuk anak C1, namun tetap disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sebagai berikut.

- Kemampuan akademik maksimal setara kelas 1
- Dilengkapi dengan pendekatan pembelajaran sesuai kondisi siswa C1
- Dilengkapi panduan penggunaan SK dan KD serta panduan pembelajaran yang jelas
- Dilengkapi panduan pengembangan sarana prasarana yang sesuai siswa C1
- Karakteristik SK dan KD adalah praktis dan digunakan langsung dalam kehidupan sehari-hari siswa C1

Perlu SK dan KD khusus agar terlatih koordinasi sensomotorik, dapat mengurus diri pribadi, memelihara dan memimpin diri, acuh tak acuh suka menarik diri.

Perlu dikembangkan prinsip pembelajaran untuk melatih mengendalikan diri, intensitas konsentrasi, perhatian pada orang, latihan motivasi.

Peningkatan kecedasan hanya tahap optimasi, perlu lebih menekankan keterampilan langsung terkait penggunaan kemampuan akademiknya

3. KAJIAN KEBIJAKAN KURIKULUM TUNA DAKSA SEDANG (D1)

Perlu dikaji dan dikembangkan SK dan KS untuk anak D1 , namun tetap disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sebagai berikut.

- Kemampuan akademik maksimal setara kelas 3
- Dilengkapi dengan pendekatan pembelajaran sesuai kondisi siswa D1
- Dilengkapi panduan penggunaan SK dan KD serta panduan pembelajaran yang jelas
- Dilengkapi panduan pengembangan sarana prasarana yang sesuai siswa D1
- Karakteristik SK dan KD adalah praktis dan digunakan langsung dalam kehidupan sehari-hari siswa D1

Perlu SK dan KD khusus agar terlatih koordinasi sensomotorik, dapat mengurus diri pribadi/mandiri, memelihara dan memimpin diri, acuh tak acuh suka menarik diri.

Perlu dikembangkan prinsip pembelajaran untuk melatih mengendalikan diri, intensitas konsentrasi, perhatian pada orang, latihan motivasi.

Peningkatan kecedasan hanya tahap optimasi, perlu lebih menekankan keterampilan langsung terkait penggunaan kemampuan akademiknya

4. KAJIAN KEBIJAKAN KURIKULUM PENDIDIKAN INKLUSI/TERPADU

Berdasarkan hasil kajian dan analisis pendidikan terpadu:

- Perlu pembekalan assessment bagi guru tentang kemampuan awal siswa
- Kemauan untuk berinteraksi antar pribadi guru (GPK dan guru regular)
- Mengubah kebiasaan Guru memberikan penilaian yang sama terhadap siswa regular dan siswa ABK, sehingga penilaian disesuaikan dengan karakteristik ABK
- Melakukan analisis hasil penilaian dan tindak lanjut kegiatan sesuai dengan kemampuan ABK
- Prinsip pembelajaran secara umum perlu ditambah, yaitu dengan: prinsip kasih sayang, prinsip kebermaknaan bagi hidup anak (meaningfull), -prinsip perbaikan berkelanjutan, prinsip menghargai perbedaan
- Perlu pemahaman bagi guru tentang: pebgelolaan kelas dengan ABK di kelas regular, aturan penilaian untuk ABK dan kegiatan tindak lanjut atau ketuntasan belajar ABK.

LAMPIRAN :

1. Hasil diskusi Buku: Pelaksanaan Pendidikan Inklusi

NO	KONSEP	KEBIJAKAN/ PEDOMAN	DASAR KEBIJAKAN	KEKUATAN	ALASAN	TANTANGAN	PERMASA- LAHAN	USULAN PERBAIKAN
1	...perkembangan kurang menggemirakan	Buku 1, Bab 1, hal 2	-	Kurang tepat	Kesadaran orang akan pendidikan inklusi sudah semakin baik	sosialisasi ditingkatkan	Perlu perbaikan atas pernyataan tersebut	...perkembangannya semakin baik, karena pihak-pihak yang berkepentingan semakin memahami dan mendukung tentang pendidikan inklusi
2	Didalam diri individu berkelainan... Sebaliknya didalam diri individu berbakat pasti terdapat juga kecacatan...	Buku 1, Bab III, hal 12 Bab IV, hal 27	UU nomor 20 tahun 2003	Kurang tepat	Tuhan YME menciptakan manusia sempurna	Penggunaan konsep yang konsisten dan tepat sehingga dapat mengubah paradigma pendidik	Perlu perbaikan atas pernyataan tersebut	Berkelainan diganti dengan kebutuhan khusus, Kecacatan diganti dengan kekurangan
3	Landasan pendidikan inklusi	Buku 1, Bab III, hal 13	UU nomor 20 tahun 2003	Bisa diterapkan	Diperlukan untuk memayungi landasan lain	ABK harus memperoleh layanan pendidikan	-Sekolah regular belum siap mengubah system -Masyarakat belum paham -Guru belum memiliki sikap inklusif	-Diperlukan sosialisasi PP tentang pendidikan inklusif -Perlu dukungan kebijakan Pemda (otonomi daerah) yang sinergi Sisdiknas

4	Komponen yang perlu dipersiapkan	Buku 1, Bab IV, hal 28		Kurang lengkap	Beda arti pendidik dan tenaga kependidikan		Perlu ditambah untuk nomor 3	Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
5	Klasifikasi anak berkebutuhan khusus	Buku 2, Bab II, hal 5-6 Dan hal 60	-Pasal 31 UUD 1945 - UU nomor 20 tahun 2003	Belum lengkap	Kelompok ABK yang tidak termasuk dalam buku pedoman	Semua jenis kelainan harus ditangani	Kelompok ABK yang lain: 1. Autis, 2. gangguan motorik, 3. korban narkoba, dan 4. kelainan temporer (contoh: korban bencana alam, kejahatan orang dewasa, dll,) belum ada dalam buku pedoman	Dilengkapi keterangan tentang Autis, gangguan motorik, korban narkoba, dan kelainan temporer
6	... tetap menggunakan kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan yang bersangkutan	Buku 3 Bab II, hal 4	- UU nomor 20 tahun 2003	Belum bisa diterima	ABK kurang mampu dengan target dari kurikulum tersebut	Guru berani memodifikasi ataupun mengadaptasi kurikulum yang berlaku di satuan pendidikan	Belum ada pedoman memodifikasi ataupun mengadaptasi kurikulum	Perlu pedoman memodifikasi atau mengadaptasi kurikulum yang ada
7	Peserta didik berkelainan	Buku 3 Bab II, hal 5-6	-Pasal 31 UUD 1945 - UU nomor 20 tahun 2003	Belum lengkap	Tidak sesuai dengan buku 2, Bab II, hal 5-6 Dan hal 60		Tidak sesuai dengan buku 2, Bab II, hal 5-6 Dan hal 60	Dibuat sesuai dengan buku 2, Bab II, hal 5-6 Dan hal 60
8	Pengembangan	Buku 3	- UU nomor 20	Belum	Tidak ada	Belum siap	Belum semua	Perlu rambu-rambu

	Program pengajaran individual	Bab II, hal 26	tahun 2003	lengkap	rambu-rambu tentang peran tim PPI	orang-orang yang terkait dengan PPI	orang paham pendidikan inklusi dan terbatas waktu	tentang peran tim PPI Dan sosialisasi kepada guru agar memiliki sikap inklusif
9	Lamp. Contoh 2	Buku 3 , Lampiran 1 hal 45		Belum bisa diterima	Kurang lengkap pada: -layanan khusus yang direkomendasikan -catatan kesehatan	-Perlu tenaga ahli di sekolah di sekolah yang memberi rekomendasi -diteliti penyebab anak kejang	-Kurang tersedia sumber daya -Guru tidak diperbolehkan langsung memberikan obat pada anak	Perlu guru ABK dan seminimal mungkin tenaga ahli -sediakan ruang khusus untuk menenangkan anak -konsultasi pada tim ahli/dokter
10	Tugas guru kelas	Buku 4, Bab II, -hal 6 -hal 10		Konsep diterima, tetapi belum bisa diterapkan	Bermacam-macam karakteristik ABK	-Mengubah sikap inklusif pada guru -keterbatasan SDM untuk ABK	guru kelas yang belum paham tentang ABK -ABK di SD perlu penanganan yang continue	- guru kelas perlu in-service training -Perlu GPK yang menetap di SD
11	Pembinaan karir	Buku 4, Bab III, hal 30-34		Konsep diterima, tetapi belum bisa diterapkan	Kegiatan perlu diakomodir ataupun dilembagakan	Perlu difasilitasi	Belum terbiasa melakukan penelitian praktis	-perlu pelatihan untuk penelitian praktis -perlu dukungan lembaga

12	Merencanakan KBM	Buku 6, Bab II, hal 5		Belum dapat diterapkan	Perlu adanya informasi tentang kemampuan awal siswa	Pembekalan assessment bagi guru	Untuk adaptasi kurikulum inklusi, belum semua guru mampu melakukan assessment	Ditambah dengan kegiatan: Assessment kemampuan awal siswa
13	Mengelola interaksi antar pribadi	Buku 6, Bab II, hal 6		Dapat diterapkan	Sudah sesuai dengan kondisi kelas yang heterogen	Belum semua siswa umum mau menerima ABK	-Belum adanya kesadaran siswa regular terhadap ABK -Belum semua guru memiliki sikap inklusif	-mengelola interaksi antar pribadi siswa dengan bantuan guru ABK -mengelola interaksi antar pribadi guru (GPK dan guru regular)
14	Melaksanakan evaluasi	Buku 6, Bab II, hal 6		Dapat diterapkan tetapi masih terdapat kekurangan	Perlu analisis hasil evaluasi untuk mengadakan tindak lanjut	Perlu penilaian selama KBM sesuai dengan karakteristik ABK	Guru memberikan penilaian yang sama terhadap siswa regular dan siswa ABK	-melakukan penilaian sesuai dengan karakteristik ABK -analisis hasil penilaian dan tindak lanjut
15	Prinsip umum	Buku 6, Bab II, hal 7		Dapat diterapkan tetapi masih perlu penambahan	Membangun sikap inklusif guru	Perlu pemahaman yang komprehensif tentang sikap inklusif dari guru	Adanya kelengkapan prinsip pembelajaran shg guru memiliki sikap inklusif yang komprehensif	Perlu ditambah dengan : -prinsip kasih sayang -prinsip kebermaknaan bagi hidup anak (meaningfull) -prinsip perbaikan

								berkelanjutan -prinsip menghargai perbedaan
16	Merencanakan pengelolaan kelas	Buku 6, Bab II, hal 31		Dapat diterapkan tetapi masih perlu penambahan	ABK dapat mengikuti pembelajaran dengan optimal	Pengaturan ABK yang tepat	Tidak semua guru memahami penempatan ABK yang tepat	Perlu penjelasan yang lebih rinci tentang penempatan ABK
17	Merencanakan penilaian	Buku 6, Bab II, hal 33		Dapat diterapkan tetapi masih perlu penambahan	-Mengetahui ketuntasan belajar ABK	Mengubah kebiasaan dalam menilai guru rehuler yang belum tepat	Guru rehuler masih belum paham aturan penilaian untuk ABK	Perlu penambahan dalam penilaian, yang terkait dengan petunjuk teknis penilaian
18	Manajemen komponen pendidikan	Buku 7, Bab III, -hal 10 -hal 12 (point g, mengatur pelaksanaan kenaikan kelas) -hal 13-14		Perlu ditinjau ulang	Sulit diterapkan	-Mengelola siswa regular yang ada (jumlahnya besar) ditambah 5 ABK -mengatur kenaikan kelas -mengadakan tenaga kependidikan	Tidak semua guru memiliki pemahaman tentang ABK dan sikap inklusif Guru regular belum memahami penentuan kenaikan kelas Kondisi lapangan belum memiliki jumlah ideal terkait dengan	-Pembatasan jumlah ABK -Perlu penjelasan yang rinci tentang aturan kenaikan kelas -perlu diadakan tenaga kependidikan

		-hal 17-18				Masyarakat yang memahami perbedaan	tenaga kependidikan Masyarakat yang terbiasa dengan pengelompokan yang homogen	-perlu sosialisasi konsep inklusif baik untuk pihak sekolah, orang tua siswa dan masyarakat
19	Partisipasi masyarakat	Buku 8, Bab II, hal 19-22		Dapat dilaksanakan	Agar semua orang tua ABK memahami pendidikan formal	Orang tua tidak menyembunyikan ABK	Belum semua masyarakat mengetahui tentang pendidikan inklusi	Perlu sosialisasi pada masyarakat tentang pendidikan inklusi
20	Pendayagunaan partisipasi masyarakat	Buku 8, Bab II, hal 23-29		Dapat dilaksanakan	Tidak semua pelaku ekonomi peduli terhadap pelaksanaan pendidikan	Pemberdayaan pelaku ekonomi dalam pengadaan dana pendidikan	Belum ada yang menjembatani penyandang dana dengan penyelenggaraan pendidikan inklusi	Perlu lembaga yang mampu memberdayakan masyarakat untuk pengadaan dana pendidikan
21	Bentuk partisipasi masyarakat	Buku 8, Bab III, hal 30-43	PP no.39 1992, ps. 4	Dapat dilaksanakan	Pelaksanaan SPPI di sekolah belum berjalan efektif	Ada lembaga layanan ABK di masyarakat	Masyarakat yang peduli layanan ABK relative sedikit	Dinas terkait memfasilitasi penyelenggaraan layanan ABK nonformal
22	Menstimulasi partisipasi masyarakat	Buku 8, Bab III, hal 44		Belum bisa dilaksanakan	Mayoritas masyarakat belum mengenal pendidikan	Mengubah paradigma masyarakat mengenal pendidikan	Perlu keseriusan dan terus menerus melakukan stimulasi pada masyarakat	-Dinas memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusi -Sosialisasi dengan

					inklusi	inklusi		buku pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusi
23	Wadah partisipasi masyarakat	Buku 8, Bab III, hal 53		Dapat dilaksanakan		Keberadaan BPD yang jelas	Anggota BPD belum berpartisipasi	Dilibatkan dalam keanggotaan Dewan Sekolah

2. Beberapa catatan untuk masing-masing buku:

Buku 1

1. Sosialisasi falsafah pendidikan inklusi perlu ditingkatkan
2. Penggunaan konsep yang konsisten dan tepat sehingga dapat mengubah paradigma pendidik. Misal: konsep berkelainan diganti dengan berkebutuhan khusus, kecacatan diganti dengan kekurangan.
3. Sekolah regular belum siap mengubah sistem yang ada dengan pendidikan inklusi karena perlu mengubah paradigma kepala sekolah, guru dan perangkat terkait, sehingga memiliki sikap inklusif.
4. Adanya payung hukum penyelenggaraan pendidikan inklusif disertai dukungan kebijakan Pemda (otonomi daerah) yang disinergikan dengan Sisdiknas
5. Perlu penjelasan rinci arti pendidik dan tenaga kependidikan

Buku 2

1. Menambahkan kelompok ABK yang sudah ada di buku 2 yaitu: kelompok Autis, gangguan motorik, korban narkoba, dan kelainan temporer (contoh: korban bencana alam, kejahatan orang dewasa, dll,) dan dibuatkan alat identifikasinya.
2. Belum ada pedoman bagi guru memodifikasi ataupun mengadaptasi kurikulum kedalam pendidikan inklusi yang berlaku di satuan pendidikan

Buku 3

- Perlu disesuaikan konsep pada buku 3 Bab II, hal 5-6 dengan buku 2, Bab II, hal 5-6 dan hal 60
- Ada rambu-rambu tentang peran tim PPI
- Ada layanan khusus yang dapat merekomendasikan tentang catatan medis ABK

- Perlu GPK dan tenaga profesional lain (tim ahli/dokter) yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan inklusi
- Disediakan ruang khusus untuk menenangkan anak

Buku 4

- Guru kelas belum paham tentang ABK, sehingga perlu in-service training.
- Perlu GPK yang menetap di SD untuk menangani ABK
- Adanya kegiatan penelitian yang diakomodir ataupun dilembagakan
- Perlu pelatihan untuk penelitian praktis
- Dukungan lembaga dan penghargaan guru dalam meningkatkan kemampuan profesi
- Mengadakan dan mengaktifkan RC (resources center) sebagai wadah GPK

Buku 6

- Pembekalan assessment bagi guru tentang kemampuan awal siswa
- Belum semua siswa umum mau menerima ABK, sehingga guru membantu dalam mengelola interaksi antar pribadi siswa.
- Kemauan untuk berinteraksi antar pribadi guru (GPK dan guru regular)
- Mengubah kebiasaan Guru memberikan penilaian yang sama terhadap siswa regular dan siswa ABK, sehingga penilaian disesuaikan dengan karakteristik ABK
- Melakukan analisis hasil penilaian dan tindak lanjut kegiatan sesuai dengan kemampuan ABK
- Prinsip pembelajaran secara umum perlu ditambah, yaitu dengan:

- -prinsip kasih sayang
- -prinsip kebermaknaan bagi hidup anak (meaningfull)
- -prinsip perbaikan berkelanjutan
- -prinsip menghargai perbedaan
- Perlu pemahaman bagi guru tentang: pebgelolaan kelas dengan ABK di kelas reguler, aturan penilaian untuk ABK dan kegiatan tindak lanjut atau ketuntasan belajar ABK.

Buku 7

- Tidak semua guru memiliki pemahaman tentang ABK dan sikap inklusif, sehingga jumlah ABK 2 saja di kelas
- Perlu penjelasan yang rinci tentang aturan kenaikan kelas
- Adanya peran yang nyata bagi tenaga kependidikan
- Perlu sosialisasi konsep inklusif baik untuk pihak sekolah, orang tua siswa dan masyarakat

Buku 8

- Masih ada orang tua yang menyembunyikan ABK, sehingga poerlu sosialisasi pada masyarakat tentang pendidikan inklusi
- Tidak semua pelaku ekonomi peduli terhadap pelaksanaan pendidikan
- Perlu lembaga yang mampu memberdayakan masyarakat untuk pengadaan dana pendidikan
- Dinas terkait memfasilitasi penyelenggaraan layanan ABK nonformal
- Melibatkan keberadaan BPD dalam keanggotaan Dewan Sekolah

3. Kajian SK dan KD

Kajian SK dan KD SDLB-C1

Kelompok C1 dipandu oleh Dr. Ishartiwi dari UNY dan Dra. Iis Susmiati dari SDLB Lebak Bulus. Berikut beberapa kesepakatan yang diperoleh melalui diskusi sekelompok setelah masing-masing sub-kelompok yang dibentuk berdasarkan mata pelajaran mengkaji masing-masing mata pelajaran:

- 1) Standar kompetensi (SK) untuk masing-masing mata pelajaran sebagian besar terlalu tinggi dan melebihi kapasitas kemampuan anak C1
- 2) Rumusan kompetensi dasar (KD) untuk masing-masing mata pelajaran terlalu tinggi dan tidak mungkin mampu dicapai oleh siswa C1. Untuk KD yang terlalu tinggi tersebut harus dibuang.
- 3) KD yang termasuk kategori “sulit” namun relevan bagi kebutuhan anak-anak C1 sehingga dapat digunakan dalam membantu dalam kehidupan sehari-hari, sebaiknya dijabarkan menjadi indikator yang lebih mungkin tercapai oleh anak C1. Contoh, kata “mendeskripsikan” diganti dengan menunjukkan, menjumlahkan bilangan yang disimbolkan dengan angka sebaiknya diganti dengan kegiatan menjumlah melalui benda konkrit.
- 4) Arah kebijakan kurikulum C1 tidak perlu dipayungi dengan kelompok mata pelajaran, tetapi diarahkan untuk kebutuhan pengembangan kompetensi dasar yang bersifat integratif dan memuat keterampilan fungsional sebagai bekal hidup di masyarakat.
- 5) Untuk acuan bagi semua sekolah, perlu dikembangkan model kurikulum yang memuat rambu-rambu yang didasari karakteristik jenis ketunaan. Untuk pengaturan struktur kurikulum, sebaiknya diserahkan sepenuhnya ke sekolah.
- 6) Alokasi waktu dalam kebijakan kurikulum tidak perlu dibagi berdasarkan semester karena pencapaian kompetensi sangat beragam dan bergantung kepada kecepatahan siswa secara individu.
- 7) Perlu dikembangkan kompetensi-kompetensi fungsional yang dikembangkan dalam upaya pembinaan bakat istimewa seperti olahraga, seni dan keterampilan.

- 8) Karena proses pembelajaran pada kelompok C1 menggunakan pendekatan tematik, maka untuk mata pelajaran IP dan seni budaya dapat dikaitkan dengan mata pelajaran lain, tidak perlu ada SK dan KD tersendiri setiap mata pelajaran. IPA dapat diajarkan secara terpisah (bukan tematik) setelah di kelas 4.

Kajian SK dan KD SDLB-D1

Kelompok C dipandu oleh Drs. Salim Choiri dari UNS Solo, dan Drs. Aswin Hutauruk, M.Pd. Berikut hal-hal umum yang menjadi catatan sepanjang diskusi kelompok dan diskusi sub-kelompok berdasarkan mata pelajaran:

SK dan KD yang sekarang ini digunakan di sekolah terlalu tinggi dan tidak mempertimbangkan karakter peserta didik. Tidak ada rambu-rambu yang jelas sehingga SK dan Kd tersebut dapat diterapkan. Dalam kebijakan yang beredar saat ini, anak-anak yang tergolong D1 diperlakukan seolah-olah seragam, pada hal masing-masing anak tersebut memiliki kebutuhan khusus.

Sebagian besar rumusan KD dan SK menggunakan kata-kata kerja yang sulit dan kadang-kadang bertentangan dengan kondisi peserta didik, misalnya untuk KD “membaca lancar” di bahasa Indonesia menjadi sulit dicapai oleh anak yang mengalami gangguan bicara. Untuk anak yang seperti ini sebaiknya diganti dengan kompetensi lain yang lebih fungsional dan dapat dicapai.

Rumusan SK dan KD untuk anak D1 sebaiknya diorientasikan pada pengembangan sikap yang mandiri. Misalnya, untuk KD mengidentifikasi faktor cuaca, sebaiknya diganti dengan mengenali ciri-ciri hujan akan turun. Jika mereka mengenali ciri-ciri hujan akan turun, maka mereka dapat mempersiapkan diri agar tidak keujanan.

Kajian Pendidikan Inklusi/Terpadu

Kelompok inklusi/terpadu dipandu oleh Prof. Mulyono (UNJ), dan Dra. Irna Syafei (Universitas Sahid). Berikut hal-hal umum yang menjadi catatan sepanjang diskusi

kelompok dan diskusi sub-kelompok berdasarkan jenis panduan yang dibahas.

Pedoman yang dibahas adalah :

- 1) Mengenal pendidikan inklusi
- 2) Alat identifikasi anak berkebutuhan khusus
- 3) Pengembangan kurikulum
- 4) Pengadaan dan pembinaan tenaga kependidikan
- 5) Kegiatan belajar mengajar
- 6) Manajemen sekolah
- 7) Pemberdayaan masyarakat

Berbagai persoalan muncul pada saat diskusi, umumnya menyoroti panduan yang belum lengkap, sarana, dan aturan pelaksanaan termasuk kebijakan daerah berkaitan dengan penyediaan kebutuhan tenaga, peralatan, dan biaya.

Isu substansi yang sering menjadi sorotan adalah pelaksanaan pendidikan inklusi/terpadu yang diperlakukan/dianggap sebagai pendekatan. Inklusif sebetulnya adalah sikap yang seharusnya ada dalam setiap diri pendidik. Apabila semua pihak terutama pendidik memiliki sikap inklusif, berbagai persoalan akan dapat dan mudah diatasi. Dalam implementasi saat ini, pada umumnya para pendidik atau penyelenggara pendidikan inklusi belum sepenuhnya didasari atas sikap inklusif (terbuka). Sikap eksklusif masih mewarnai penyelenggaraan pendidikan inklusi, sehingga berbagai persoalan yang seharusnya dapat diatasi, justru menjadi penghalang bagi anak yang berkebutuhan khusus (ABK) untuk memperoleh layanan. Sebagai contoh, pada saat diskusi diusulkan bahwa sekolah-sekolah biasa yang menyelenggarakan pendidikan inklusi harus membatsi jumlah kelainan tidak lebih dari dua jenis, dan untuk masing-masing jenis tidak boleh lebih dari 2 orang.

Kondisi lain, sekolah-sekolah yang menyelenggarakan inklusi, pamornya di masyarakat menjadi turun. Ini konsekuensi sosial yang muncul dari masyarakat. Hal ini perlu diatasi melalui sosialisasi ke semua lapisan masyarakat. Akibat dari pandangan yang demikian, sekolah-sekolah keberatan menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus.

Meskipun tidak berlaku umum, namun kondisi seperti ini menjadi salah satu faktor penghambat kelancaran program pendidikan inklusi.

Isu lain adalah penyediaan tenaga guru inklusi yang profesional di sekolah reguler perlu ditingkatkan. Melalui guru inklusi yang profesional, proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh setiap anak, khususnya anak-anak yang berkebutuhan khusus.

Semu persoalan tersebut menjadi tantangan bagi penyelenggara pendidikan untuk terus mengembangkan berbagai strategi untuk penyelenggaraan pendidikan inklusi/terpadu sehingga anak-anak yang seharusnya mendapat pelayanan khusus dapat ditangani dengan baik tanpa harus mendapat perlakuan diskriminatif.

4. Kajian Pelayanan Pendidikan Khusus di Luar Negeri

- **PERKEMBANGAN SISTEM LAYANAN**

Layanan terhadap penyandang cacat telah berkembang sejak abad pertengahan. Perhatian terhadap penyandang cacat, terutama di Eropa yang berhasil didokumentasikan, diawali oleh para rohaniawan dan sosiawan pada abad XVI. Pada masa itu, anak-anak tunanetra dan tunarungu dikumpulkan (**segregatif**) secara homogen yang awalnya hanya untuk mendapat bimbingan kerohanian, bina diri dan sosial.

Layanan bimbingan tersebut kemudian berkembang menjadi bimbingan akademik. Berdasarkan hal itu munculah ide untuk menciptakan media komunikasi dalam bidang akademik untuk anak-anak tersebut, sehingga terjadilah rintisan pengembangan bahasa isyarat dan huruf braille.

Pada periode yang hampir bersamaan, para pendidik mulai tertarik mengkaji kemampuan intelektual anak. Hal ini didorong oleh asumsi bahwa pendidikan akademik mempersyaratkan kemampuan intelektual, sehingga sekolah hanya diperuntukkan bagi anak yang mempunyai kemampuan intelektual memadai. Sejak

saat itu dirintislah pengembangan tes intelegensi dengan tujuan untuk seleksi calon siswa.

Meskipun keberadaan layanan segregatif masih berlanjut sampai akhir abad XIX, perkembangan pesat sistem layanan bagi penyandang cacat terjadi pada awal abad XX di negara barat, khususnya Eropa, Amerika Serikat, dan Australia. Ketika wajib belajar diberlakukan di negara-negara tersebut, sekolah umum mulai menerima anak-anak dengan gangguan belajar tingkat sedang, tingkat ringan, atau gangguan fisik yang mempunyai kemampuan intelegensi untuk mengikuti pendidikan akademik.

Anak-anak tersebut ditempatkan di kelas-kelas khusus, sebagian kecil lagi di kelas biasa. Sedangkan anak-anak dengan gangguan tingkat berat belum semua memperoleh kesempatan bersekolah, atau dididik di sekolah-sekolah khusus, atau ditempatkan di panti-panti penampungan khusus.

Gerakan hak azasi manusia mempunyai dampak luar biasa terhadap perkembangan pendidikan anak berkebutuhan khusus pada pertengahan abad XX. Dipicu oleh hasil penelitian tentang diskriminasi perlakuan antara anak-anak di kelas khusus dengan anak-anak di kelas biasa, berbagai kasus kemudian muncul di pengadilan, khususnya di Amerika Serikat. Bentuk diskriminasi yang diprotes mulai dari tes intelegensi untuk seleksi yang diskriminatif bagi anak non-kulit putih, kualitas layanan akademik bagi anak berkebutuhan khusus di kelas biasa yang tidak optimal, penolakan penyandang cacat mental oleh sekolah umum, dan prestasi belajar yang secara signifikan berbeda antara anak di kelas khusus dengan mereka yang ada di kelas biasa.

Dampak dari gejolak ini adalah diundangkannya konsep *mainstreaming* di Amerika Serikat, yang kemudian juga di adopsi oleh negara-negara Eropa dan Australia, yang antara lain menggariskan:

- *Free appropriate public education* : anak berkelainan berhak memperoleh layanan pendidikan gratis di sekolah umum (seperti halnya anak-anak sebayanya)
- *Least restrictive environment*: tersedia berbagai alternatif penempatan anak berkelainan, penempatan harus bersifat akademik dan temporer:

- Kelas biasa tanpa bimbingan khusus
 - Kelas biasa dengan tambahan bimbingan di dalam
 - Kelas biasa dengan tambahan bimbingan di luar
 - Kelas khusus dengan kesempatan di kelas biasa
 - Kelas khusus penuh
 - Sekolah khusus
 - Tempat khusus (rumah sakit, panti, rumah)
- *Nondiscrimanatory evaluation*: layanan yang disediakan bagi anak berkebutuhan khusus harus berdasarkan pada hasil asesmen oleh tim multidisiplin dengan menggunakan instrumen yang tidak diskriminatif karena faktor bahasa, budaya dan jenis kecacatan.
 - *Due process*: program layanan bagi anak berkebutuhan khusus harus melalui proses legal (rujukan → asesmen informal → asesmen formal → penyusunan program pembelajaran individual → evaluasi) oleh tim multidisiplin dengan melibatkan orangtua .

Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus mengalami perubahan penting lagi pada akhir abad XX dengan gerakan mensukseskan *Education For All* oleh *United Nations' Education, Science, and Culture Organization* (UNESCO). Melalui pendidikan *inklusif* yang merupakan alternatif yang direkomendasikan, sekolah tidak dibenarkan menolak siswa karena kondisi apapun, misalnya miskin, cacat, berbeda agama, berbeda budaya, berbeda bahasa. Setiap anak harus dimungkinkan memperoleh layanan pendidikan di sekolah terdekat.

- **DEFINISI/KLASIFIKASI**

Ada berbagai klasifikasi anak berkebutuhan khusus di negara-negara barat. Di dalam berbagai perundangan, jenis kelainan meliputi:

- Kesulitan belajar: anak yang sebenarnya mempunyai tingkat intelegensi normal, tetapi mempunyai kesulitan memproses informasi yang umumnya ditemukan pada kegiatan yang berkaitan dengan membaca, menulis, bahasa dan matematika.
- Gangguan bahasa dan wicara: anak yang mempunyai masalah serius dalam berkomunikasi. Kesulitan dapat terjadi pada proses artikulasi (pengucapan bunyi bahasa) dan atau kelancaran (*fluency*).
- Retardasi mental: anak yang mempunyai keterbatasan kemampuan intelektual dan perilaku adaptif.
- Gangguan emosi: anak yang mengalami kesulitan serius dalam mengendalikan emosi dan sosial.
- Autis: anak yang sejak kecil mempunyai keterbatasan responsifitas sosial menyeluruh.
- Gangguan pendengaran: anak yang mempunyai keterbatasan atau ketidakmampuan menerima sinyal auditif.
- Gangguan penglihatan: anak yang mempunyai keterbatasan atau ketidakmampuan menerima sinyal visual.
- Buta tuli: anak yang mengalami ketidakmampuan total dalam pendengaran dan penglihatan.
- Gangguan ortopedik: anak yang mengalami gangguan fisik yang secara signifikan mengganggu aktifitas motorik dan mobilitas.
- Gegar otak traumatik: Kerusakan otak traumatik yang secara signifikan menyebabkan keterlambatan perkembangan, gangguan memory pendek, gangguan pendengaran dan penglihatan temporer, instabilitas emosi.
- Gangguan kesehatan: anak yang menderita penyakit kronis, seperti jantung, hati, animea, diabetis, asma, gangguan perhatian dan hiperaktifitas.

- Kecerdasan dan bakat istimewa: anak yang menunjukkan kemampuan luar biasa dalam berbagai aspek, seperti intelektual, kepemimpinan, kreatifitas, akademik, atletik, seni.

Cara klasifikasi lain untuk anak berkelainan adalah menggunakan pendekatan lintas kategori:

- Kelainan dengan tingkat kejadian tinggi: jenis kelainan paling umum, seperti kesulitan belajar, gangguan bahasa wicara, retardasi mental ringan, dan gangguan emosi ringan (80% dari semua anak berkebutuhan khusus)
- Kelainan dengan tingkat kejadian rendah: jenis kelainan yang lebih jarang, seperti retardasi mental berat, cacat ganda, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, gangguan ortopedik, gangguan kesehatan, autisme, gegar otak traumatik, buta-tuli.

- **ASESMEN KEBUTUHAN**

Asesmen kebutuhan adalah proses untuk mengetahui kebutuhan khusus peserta didik. Asesmen kebutuhan perlu diadakan karena program-program yang disediakan di sekolah reguler tidak dapat memfasilitasi peserta didik berkebutuhan khusus, yang pada saat lalu dikenal dengan istilah peserta didik berkelainan atau luar biasa. Selain itu, dengan beragamnya intervensi yang berkembang, diperlukan asesmen kebutuhan agar layanan atau program pendidikan yang akan disediakan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Istilah asesmen mengacu pada proses mengumpulkan informasi atau mendokumentasikan tentang kebutuhan, kelebihan dan kekurangan dari seseorang mengenai kompetensi yang dikuasai pada saat ini dan dijadikan dasar dalam pembuatan suatu program pembelajaran yang diindividualkan. Asesmen kebutuhan juga tidak untuk meranking siswa, karena apabila dilakukan perankingan, anak-anak berkebutuhan khusus akan sangat tertinggal dari mereka yang tidak berkebutuhan khusus.

Asesmen kebutuhan juga bukan suatu alat dan kegiatan atau proses untuk menyortir atau menyeleksi peserta didik berkebutuhan khusus untuk melanjutkan pendidikan mereka atau agar kelak mereka mendapatkan berbagai pekerjaan, tetapi lebih kepada *what to teach, when to teach, who to teach* dan *how to teach*. Di negara maju asesmen kebutuhan tidak saja digunakan untuk melihat kebutuhan peserta didik tetapi juga untuk melihat kebutuhan masyarakat akan layanan pendidikan.

1. Jenis asesmen

Di negara-negara maju setiap profesional melakukan asesmen berdasarkan latar belakang profesionalitas mereka. Para psikolog melakukan asesmen dalam aspek-aspek psikologis seperti perkembangan bahasa dan komunikasi; sosial dan emosi; kecerdasan; minat; bakat dan kreativitas. Bidang kedokteran seperti dokter, psikiater dan dokter spesialis melakukan asesmen sesuai dengan bidang medis dan kesehatan seperti aspek penglihatan, pendengaran dan neorologi, selain itu juga pada aspek-aspek yang mempengaruhi kesehatan peserta didik dalam proses pembelajaran seperti asma dan diabetes.

Asesmen yang dilakukan oleh pendidik berhubungan dengan bidang akademik dan faktor yang mengakibatkan gangguan atau hambatan dalam belajar, seperti pada aspek bahasa (membaca, menulis, menyimak), matematika (hitung angka, pemecahan masalah, bentuk-bentuk geometri), menulis (keterbacaan dalam tulisan, mengarang, menulis ilmiah),

Asesmen dapat dilakukan secara formal dan informal. Asesmen formal biasanya menggunakan dokumen tertulis seperti tes, kuis dan *pencil and paper test*. Asesmen secara formal memberikan skor angka atau grade berdasarkan kinerja dari peserta didik. Asesmen yang dilakukan secara informal digunakan untuk mengambil informasi tentang tindak tanduk yang informal dan menggunakan alat-alat seperti observasi, daftar inventoris, evaluasi diri dan diskusi serta partisipasi.

Jenis asesmen yang dilakukan dalam bidang pendidikan dan dapat dilakukan oleh guru adalah asesmen berdasarkan kurikulum (*curriculum based*

assessment). Asesmen ini bertujuan untuk melihat level kompetensi akademik dari peserta didik. *Developmental Based Assessment* adalah asesmen perkembangan yang bertujuan untuk melihat level pencapaian perkembangan dari peserta didik. Asesmen diagnostik digunakan untuk melihat penyebab dari permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Asesmen diagnostik dapat dilakukan oleh guru. *Criterion based assessment* adalah suatu asesmen yang dikembangkan oleh guru/tim yang bertujuan untuk melihat posisi peserta didik terhadap kriteria yang ditetapkan.

Di beberapa negara, asesmen dikembangkan berdasarkan teori seperti pada *functional behavioral assessment*. Asesmen jenis ini dikembangkan berdasarkan pendekatan behavioristik. Tujuan dari asesmen ini adalah untuk memperoleh informasi secara spesifik dan luas tentang tingkah laku peserta didik yang berkaitan dengan tujuan tingkah laku itu terjadi. Informasi yang didapat dalam proses ini akan digunakan sebagai pengembangan intervensi-intervensi untuk merubah tingkah laku-tingkah laku yang kurang tepat dan untuk mengajarkan pola-pola tingkah laku yang baru. Ini adalah langkah pertama dalam mendesain rencana bantuan dalam pembentukan tingkah laku dalam hubungannya dengan intervensi-intervensi tingkah laku yang positif.

2. Ruang Lingkup Asesmen Kebutuhan

Aspek-aspek yang diases meliputi keterampilan pra akademik, akademik, keterampilan perseptual, perkembangan kognitif, keterampilan perkembangan bahasa dan komunikasi, keterampilan personal dan sosial, adaptasi perilaku, minat, sikap dan keterampilan untuk berfungsi sebagai makhluk individu dan sosial.

Beberapa aspek yang diases dalam keterampilan pra akademik anak-anak pra sekolah seperti koordinasi motor, fungsi penglihatan dan pengamatan, fungsi pendengaran dan penyimakan, keterampilan membedakan (misalnya: warna, bentuk, gambar, angka, huruf), kompetensi bahasa (ekspresif dan reseptif), pengorganisasian persepsi (teka-teki, berbagai desain), memori (jangka pendek, jangka panjang), fungsi kognitif (misalnya: jajaran, pemecahan masalah), keterampilan menolong diri, dan kompetensi sosial.

Bidang akademik yang diases adalah membaca (kata, mengenali huruf dan pemahaman), aritmatika (penghitungan, konsep angka dan pemecahan masalah), mengeja (oral dan tertulis), menulis (menggambar, meniru dan memproduksi tulisan). Di negara-negara maju sudah tersedia instrumen akademik baku.

Asesmen keterampilan perseptual dilakukan untuk mengetahui apakah anak dapat membedakan suara pada suatu kata (*auditory discrimination*), atau perbedaan pada huruf yang di lihatnya (*visual discrimination*).

Kesenjangan antara potensi kecerdasan dengan prestasi akademik perlu diases. Hal ini untuk melihat apakah anak tersebut dapat dikategorikan sebagai anak dengan kesulitan belajar (*learning disability*).

Perkembangan bahasa dan komunikasi adalah salah satu aspek yang penting untuk dilihat. Aspek-aspek itu meliputi kemampuan berekspresi dalam bahasa seperti menulis dan berbicara serta kemampuan dalam menerima penyampaian informasi dari informan seperti menyimak dan membaca.

Sebagai manusia yang merupakan makhluk individu dan sosial, maka diperlukan keterampilan personal dan sosial. Di beberapa negara sudah ada asesmen baku untuk keterampilan ini, misalnya *Vineland Social Maturity Scale* (VSMS).

Asesmen lain yang digunakan adalah untuk melihat perilaku adaptif anak. Di beberapa negara, telah tersedia instrumen asesmen baku misalnya *American Association for Mental Deficiency (AAMD) Adaptive Behaviour Scale* yaitu suatu asesmen untuk melihat antara lain keterampilan dalam mengatur keuangan, keterampilan mobilitas, kapabilitas kemandirian, menggunakan sistem komunikasi, keterampilan menolong diri, melakukan perjalanan (*traveling*), kemampuan untuk mengisi aplikasi misalnya untuk pekerjaan, kartu keamanan sosial, dan kemampuan tentang sumber-sumber sosial.

Untuk melihat minat dan bakat dipergunakan asesmen formal dan informal. Sedangkan keterampilan fungsional dapat diases dengan daftar

inventori yang mencakup aspek keterampilan menolong diri, kesehatan dan kebersihan, mengatur rumah, menyiapkan dan membeli makanan, mengatur keuangan, membeli pakaian, mobilitas, menggunakan sumber-sumber komunitas untuk rekreasi dan penggunaan waktu luang, keterampilan berkeluarga dan terlibat dalam berbagai aktivitas di masyarakat.

Selain kondisi dari anak, asesor juga harus mengases situasi pembelajaran, materi yang diberikan, alat-alat pembelajaran, metode pembelajaran dan gaya mengajar dari guru.

3. Personel yang terlibat

Dalam melakukan asesmen, sekolah-sekolah melibatkan tim multidisipliner (orangtua, pengasuh, psikolog pendidikan, psikolog perkembangan, konselor, guru pendidikan khusus, guru kelas, dokter anak, psikiater, dan para ahli lain yang terlibat dalam pemberian bantuan kepada peserta didik berkebutuhan khusus) agar mendapat suatu profil kebutuhan, kelebihan dan kekurangan peserta didik secara holistik.

4. Prosedur

Prosedur dalam melakukan asesmen kebutuhan, dimulai dari tahap persiapan, penentuan alat-alat (instrumen) yang akan digunakan berupa tes dan non tes standar dan non standar, dan analisis hasil serta laporan. Instrumen dan butir-butir pertanyaan atau pernyataan yang dikembangkan harus sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

Asesmen biasanya dilakukan secara terus menerus (on going assessment). Informasi yang didapat dari kegiatan asesmen didiskusikan dalam tim untuk menganalisa tentang hasil asesmen yang berupa kebutuhan, kelebihan dan kekurangan dari anak. Hasil dari diskusi dijadikan landasan untuk mengembangkan program pendidikan yang diindividualisasikan.

- **KURIKULUM**

1. Pengertian

Dalam Pendidikan khusus kurikulum merupakan suatu rencana menyeluruh yang terjadi dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Selain itu kurikulum sebagai panduan guru dalam mengembangkan dan menetapkan materi serta melaksanakan pembelajaran, merencanakan pembelajaran dalam bentuk pengelolaan materi, informasi dan tugas-tugas yang mengacu pada penguasaan pengetahuan, pengertian, keterampilan, perilaku, dan nilai yang diharapkan dikuasai peserta didik.

2. Pendekatan kurikulum

Kurikulum pendidikan khusus berorientasi lima pendekatan yaitu keterampilan proses, proses teknologi, pemecahan masalah, isi atau materi belajar dan aktualisasi diri.

Kurikulum dengan pendekatan keterampilan proses menekankan pada proses mentalistik dan pengembangan keterampilan kognitif. Sedangkan kurikulum dengan pendekatan proses teknologi memandang pentingnya sarana, fasilitas, dan lingkungan dalam mendukung proses belajar anak.

Selanjutnya kurikulum dengan pendekatan pemecahan masalah menekankan bahwa anak dapat belajar optimal melalui keterlibatan secara fisik dan mental dalam memecahkan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Kurikulum dengan pendekatan isi atau materi belajar mementingkan penguasaan materi akademik; membaca, menulis, berhitung dan pengembangannya secara luas.

Kurikulum dengan pendekatan aktualisasi diri bersifat humanistik, dan mementingkan pengembangan diri sehingga apabila anak memiliki kepercayaan dan harga diri maka anak akan dapat belajar dengan optimal.

3. Cakupan Kurikulum

Secara umum kurikulum mencakup empat kompetensi yaitu kompetensi aktivitas sehari-hari, berinteraksi, akademik dan pengembangan karir. Kompetensi aktivitas sehari-hari meliputi kegiatan bina diri (self management, kegiatan pekerjaan rumah (*house chores*), kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan rekreasi dan waktu luang.

Cakupan kompetensi berinteraksi meliputi pengembangan citra diri (*self-image*), pengembangan harga diri (*self-esteem*), adaptasi perilaku sosial, pengembangan komunikasi dan pengembangan sikap mandiri.

Kompetensi akademik meliputi pengembangan kemampuan membaca, kemampuan menulis, kemampuan berhitung dan bidang studi.

Untuk mengembangkan kompetensi tersebut dilakukan melalui pembelajaran berdasarkan kemampuan awal masing-masing anak. Data kemampuan awal ini diperoleh dari kegiatan asesmen yang meliputi keterampilan pra-akademik, prestasi akademik (bagi anak yang sudah bersekolah), keterampilan perseptual (tajam dan fungsi visual auditoris), perkembangan kognitif, perkembangan bahasa dan keterampilan berkomunikasi dan keterampilan personal dan sosial.

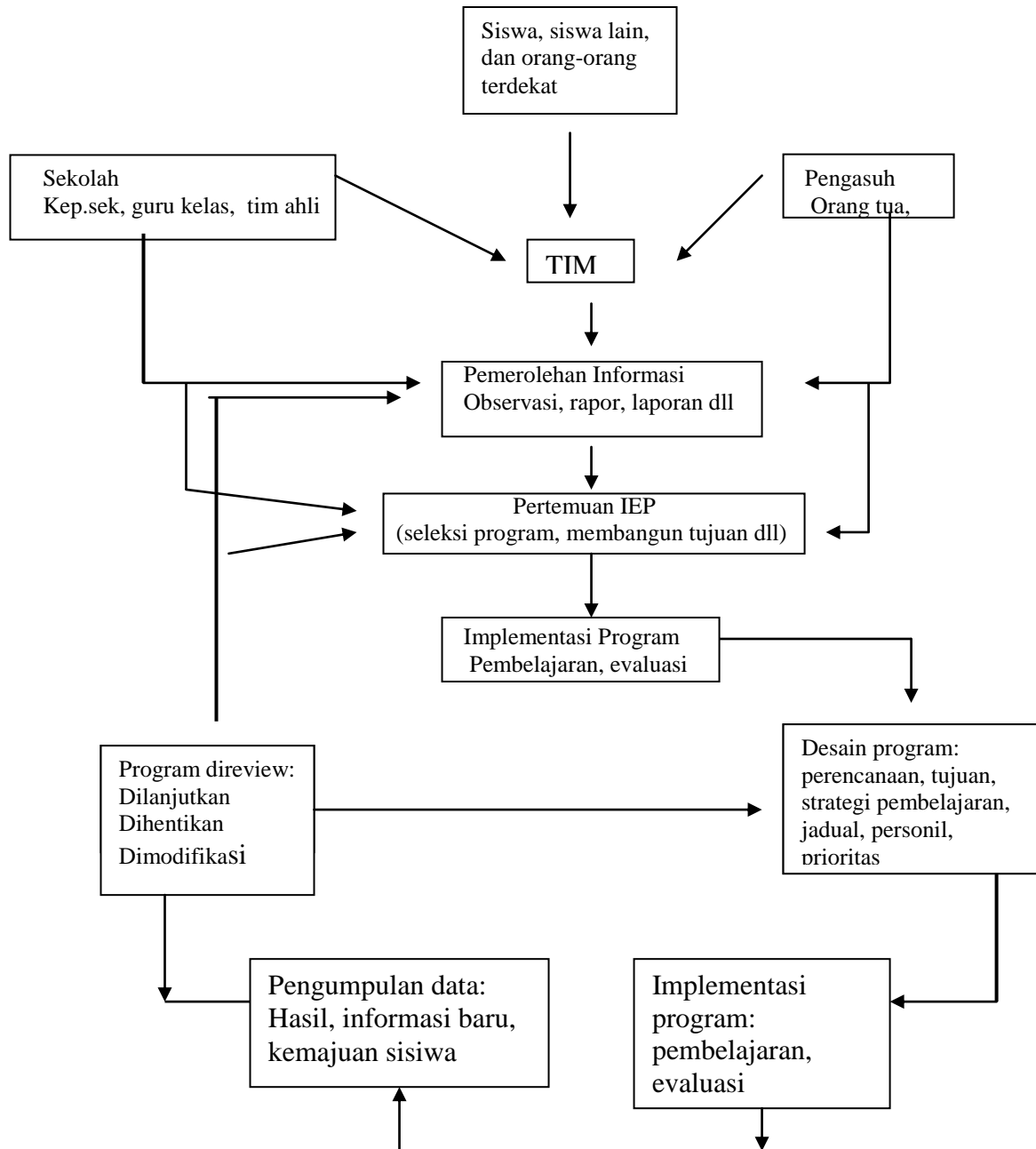
Di negara-negara barat tidak dikenal kurikulum sekolah khusus (kurikulum sekolah luar biasa). Kurikulum diberlakukan bagi semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus. Bagi anak berkebutuhan khusus, materi akademik disesuaikan dengan kecepatan dan kemampuan anak. Selain itu mereka mendapat materi khusus sesuai dengan kebutuhan khusus. Materi khusus ini dirancang dalam format program pembelajaran yang diindividualkan (PPI) dengan komponen sebagai berikut:

- Kemampuan awal yang berisi kelebihan, kekurangan dan kebutuhan anak
- Tujuan tahunan
- Tujuan jangka pendek
- Deskripsi waktu pelaksanaan
- Pendekatan
- Materi
- Penguatan
- Kriteria penilaian
- Rekomendasi penempatan ketika PPI dilaksanakan
- Personal yang terlibat
- Penanggung jawab program
- Jangka waktu program
- Waktu review program

Adapun proses pengembangan PPI dilakukan secara tim, dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini:

Gambar 1

Proses Pengembangan PPI:



- **PEMBELAJARAN**

Di sekolah-sekolah negara barat, para guru terdidik untuk mengelola kelas heterogen. Siswa dikelompokkan berdasarkan usia. Siswa berusia enam tahun duduk di kelas 1, siswa berusia delapan tahun duduk di kelas 3, siswa berusia sebelas tahun duduk di kelas 5, dst. Namun demikian, siswa yang seusia tersebut diperlakukan sebagai kelompok heterogen. Tingkat intelegensi mereka bisa berbeda-beda, gaya belajar mereka bisa bervariasi, kecepatan belajar mereka belum tentu sama. Materi ajar untuk individu siswa berdasarkan asesmen terhadap penguasaan materi sebelumnya.

Pada jam pelajaran matematika kelas 1, misalnya, sebagian besar siswa mempelajari penjumlahan bilangan 1 s.d 5. Tetapi ada dua anak yang mempunyai kemampuan luar biasa, mereka sudah mengerjakan penjumlahan bilangan sampai dengan 50. Sebaliknya, ada satu orang anak yang masih belum memahami angka sama sekali. Ketiga kelompok tersebut diakomodasi dengan materi ajar yang berbeda-beda. Dengan penjelasan singkat, dua anak unggul ditugasi mengerjakan penjumlahan bilangan s.d 50, sambil menjadi tutor sebaya bagi satu orang yang belum mengenal angka sama sekali. Guru lebih banyak memanfaatkan waktu bagi kelompok mayoritas.

Pada mata pelajaran sains kelas 4 dengan pokok bahasan jenis-jenis makanan pokok manusia, guru langsung membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil terdiri dari lima orang. Setiap kelompok harus heterogen, anak paling pandai disebar di lima kelompok, demikian juga anak paling lemah. Lembar kerja sudah disiapkan. Tugas kelompok adalah mengidentifikasi jenis-jenis makanan pokok manusia. Kepada siswa, guru sudah menjelaskan bahwa setiap kelompok berlomba menghasilkan yang terbaik. Sepuluh menit terakhir dipakai untuk presentasi. Pada satu menit terakhir, guru memberikan penegasan dan kesimpulan.

Dari ilustrasi di atas, guru dituntut untuk tidak bertindak sebagai satu-satunya sumber belajar, tetapi lebih sebagai fasilitator. Berbagai sumber belajar dapat dimanfaatkan, seperti kebun sekolah, perpustakaan, laboratorium, tokoh atau lembaga sekitar sekolah, dsb. Demikian juga, berbagai prosedur pembelajaran yang bersifat non-teacher-centered harus dikuasai dan dibiasakan, seperti pembelajaran kooperatif, *discovery*, *inquiry* dan tutor sebaya.

Meskipun guru telah mencoba mengkomunikasikan materi secara jelas bagi sebagian besar siswa, dengan komposisi kelas heterogen, diperlukan adaptasi untuk mengakomodasi kebutuhan anak berkelainan. Adaptasi mungkin dilakukan terhadap seluruh kelas, atau dalam kelompok kecil bagi anak berkebutuhan khusus. Dalam mata pelajaran akademik dasar, adaptasi dapat dilakukan dengan memberikan pre-skills, memberi contoh nyata, mengatur kembali urutan materi, mengatur kecepatan penyajian materi baru, dan memperbanyak latihan.

Adaptasi dalam mata pelajaran akademik (*content area*) dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan awal, mengatur kembali isi, dan memperjelas konsep dan istilah-istilah khusus. Pengaturan kelas yang fleksibel, seperti penataan kelas (*moving class*), bagi anak berkebutuhan khusus juga sangat penting, agar mereka dapat memfokuskan pada pembelajaran.

Pada dasarnya, pembelajaran di sekolah-sekolah menggunakan pendekatan belajar tuntas individual dengan pembelajaran siswa aktif, *welcome* dan *joyfull*. Kurikulum dipandang sebagai target yang harus dicapai oleh siswa, tetapi hasil pencapaian sangat bergantung kepada individual siswa. Siswa boleh mempelajari suatu materi, setelah tuntas pada materi sebelumnya. Namun demikian, tidak berarti bahwa pembelajaran selalu dilakukan secara individual. Pembelajaran dapat dilakukan secara klasikal / kelompok besar, kelompok kecil, berpasangan, atau mungkin individual.

Ada beberapa tip untuk pengelolaan pembelajaran di kelas heterogen:

- Identifikasi tuntutan lingkungan, kurikuler, dan pembelajaran di kelas
- Pahami kebutuhan dan kemampuan belajar setiap anak
- Pahami bidang kelebihan setiap anak
- Pahami bidang kelemahan setiap anak
- Rencanakan adaptasi pembelajaran untuk mengakomodasi perbedaan
- Selalu mengikuti perkembangan dan kemajuan setiap anak

- **PENILAIAN**

Di sekolah-sekolah barat para guru diberikan otonomi untuk melakukan memilih materi pembelajaran, memilih metode pembelajaran dan memilih tehnik evaluasi.

Penilaian dilakukan untuk mengukur kemajuan siswa dengan berbagai cara, seperti tes tertulis, observasi, tes kinerja, penugasan, tes lisan, penilaian portofolio, jurnal, inventori, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Sebelum mempergunakan teknik mana yang sesuai untuk penilaian yang akan dipergunakan, terlebih dahulu perlu diperhatikan prinsip penilaian sebagai berikut: sistem belajar tuntas (*mastery learning*), siswa tidak diperkenankan mengerjakan tugas berikutnya sebelum mampu menyelesaikan pekerjaan dengan benar dan hasil yang baik, menggunakan acuan kriteria (*criterion referenced test*), penilaian berkelanjutan (*proses*), mengukur tiga ranah, dan jujur serta objektif.

Fokus pembelajaran dan penilaian pada ranah kognitif bukan hanya pada kemampuan menghafal fakta atau teori (*pemahaman*) setiap mata pelajaran, tetapi pada jenjang yang lebih tinggi seperti evaluasi, analisis, sintesis. Dalam mata pelajaran sejarah misalnya, fokus pertanyaan bukan pada menghafalkan tahun, nama, tempat, dan kejadian yang ada pada buku-buku pelajaran sejarah, tetapi lebih pada persepsi, respons, dan tanggapan anak terhadap peristiwa sejarah dari segi sosial, ekonomi, politik dan psikologis.

Pertanyaan pada mata pelajaran geografi bukan pada nama-nama tempat, kota, sungai, gunung, dsb, tetapi pada kemampuan membaca peta, mengukur jarak, memperkirakan suhu dan menyebutkan produksi. Oleh karena itu, penilaian di sekolah-sekolah tersebut lebih banyak dilakukan secara informal menggunakan teknik penilaian unjuk kerja dan portofolio, bukan tes-tes hasil belajar.

Berbagai adaptasi diperlukan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Adaptasi tes dapat dilakukan sebelum, selama, dan sesudah tes. Adaptasi sebelum tes dapat berupa pengembangan bimbingan belajar, pelatihan mengerjakan tes, pelatihan strategi mengerjakan tes, memodifikasi soal-soal tes. Adaptasi selama tes dapat berupa penyusunan alternatif soal tes, alternatif cara menyampaikan tes. Adaptasi setelah tes dapat berupa pengubahan dari sistem huruf menjadi angka, pengubahan kriteria

penilaian. Adaptasi penilaian unjuk kerja siswa dapat berupa perubahan fokus dari hasil menjadi proses, fokus pada penilaian realistik atau outentik (menanyakan penerapan pada kehidupan sehari-hari).

Portofolio umumnya terdiri dari produk atau bukti yang dapat dilihat dari hasil unjuk kerja seperti catatan harian, wawancara, sampel pekerjaan, dsb. Anak berkebutuhan khusus memerlukan bimbingan bagaimana memilih dan menilai portofolio milik sendiri.

Di negara-negara barat, pelaporan kepada orang tua dilakukan setiap hari akhir pembelajaran, mingguan, bulanan, dan semesteran serta pada akhir tahun. Tujuan pelaporan adalah untuk mengkomunikasikan kondisi perkembangan anak.

Pelaporan berbentuk kuantitatif dan kualitatif melalui buku komunikasi. Penilaian hasil belajar siswa disajikan lebih banyak disampaikan dalam bentuk huruf A,B,C,D,E. Dalam belajar tuntas, nilai yang diberikan kepada siswa mempunyai dampak pada pembelajaran selanjutnya. Seorang anak dianggap tuntas jika telah memperoleh nilai minimal C. Siswa yang belum dianggap tuntas pada satu pokokbahasan masih akan mendapat tugas-tugas lain untuk menuntaskan pokok bahasan tersebut.

Tidak ada istilah *tidak-naik* pada sekolah-sekolah barat. Semua anak akan berpindah ke kelas di atasnya pada tahun berikutnya. Tetapi, pada kelas atas, program pembelajaran siswa dapat bervariasi berdasarkan hasil yang dicapai pada kelas sebelumnya. Oleh karena itu, rapot siswa tidak hanya berisi nilai yang diperoleh pada setiap mata pelajaran, tetapi juga daftar pokok bahasan yang telah dituntaskan untuk setiap mata pelajaran. Guru menentukan materi pembelajaran di kelas baru berdasarkan rapot di kelas sebelumnya.

H. Strategi kegiatan

Kegiatan ini dilakukan melalui workshop dan diskusi fokus, dan presentasi hasil kajian masing-masing kelompok.

I. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Panduan pendidikan Inklusi sudah disempurnakan dan telah dicetak secara terbatas.

SD Inklusi keberatan menurunkan SKL dan kepala sekolah tidak berani memberikan ijazah karena akan menjatuhkan sekolah yang bersangkutan, apalagi jika masuk ke SMP tertentu, sekolah ini akan diprotes. Solusinya, anak yang berkebutuhan khusus diharapkan masuk ke SMP Inklusi.

Belum ada payung hukum yang menjadi acuan bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dalam menterjemahkan dalam proses pembelajaran, seperti penentuan kenaikan kelas, penentuan kelulusan. Seharusnya, bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, kriteria kenaikan kelas dan kelulusan harus disesuaikan dengan kekhususan anak.

Pendidikan inklusif harus dipahami sebagai pendidikan bukan hanya untuk anak yang berkelainan, melainkan bagi semua anak tanpa membedakan status, jender, termasuk anak-anak yang "terkucilkan" ketidak beruntungan dalam segala faktor, baik secara internal maupun. Perlu ada kesepahaman tentang pendidikan inklusif ini bagi semua kalangan.

Resolusi internasional: pendidikan inklusif sebagai pendidikan terbuka, Indonesia sebagai salah satu negara anggota UNESCO harus mentatati resolusi ini, jika tidak, akan ada sanksi. Sebagai salah satu contoh, belum lama ini pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia "ditegur" oleh UNESCO dengan konsep "Terpadu" yang memaksa peserta didik untuk menyesuaikan dengan sistem. Dalam berbagai forum internasional, selalu ditegaskan bahwa inklusif bukan hanya untuk anak cacat.

Saran

Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap hasil kajian, maka perlu disarankan beberapa hal berikut:

- Perlu pembekalan assessment bagi guru tentang kemampuan awal siswa

- Belum semua siswa umum mau menerima ABK, sehingga guru membantu dalam mengelola interaksi antar pribadi siswa.
- Kemauan untuk berinteraksi antar pribadi guru (GPK dan guru regular)
- Mengubah kebiasaan Guru memberikan penilaian yang sama terhadap siswa regular dan siswa ABK, sehingga penilaian disesuaikan dengan karakteristik ABK
- Melakukan analisis hasil penilaian dan tindak lanjut kegiatan sesuai dengan kemampuan ABK
- Prinsip pembelajaran secara umum perlu ditambah, yaitu dengan: prinsip kasih sayang, prinsip kebermaknaan bagi hidup anak (meaningfull), -prinsip perbaikan berkelanjutan, prinsip menghargai perbedaan
- Perlu pemahaman bagi guru tentang: pebgelolaan kelas dengan ABK di kelas regular, aturan penilaian untuk ABK dan kegiatan tindak lanjut atau ketuntasan belajar ABK.